

BAB II

ALIANSI DOWN TO ZERO DAN CHILD SEX TOURISM DI THAILAND

Bab ini membahas konteks munculnya aliansi DtZ sebagai respons kolaboratif transnasional terhadap fenomena CST di Thailand. CST di Thailand berkembang seiring pesatnya industri pariwisata yang, meskipun menyumbang secara ekonomi, turut menciptakan ruang eksploitasi seksual terhadap anak (Rafiek, 2018). Dalam menghadapi persoalan ini, DtZ hadir sebagai jaringan advokasi multi-level yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan aktor lintas negara untuk menekan praktik CST melalui strategi berbasis hak anak dan kerja sama lokal-internasional (ECPAT, 2019). Bab ini bertujuan menunjukkan bagaimana struktur CST di Thailand dan arsitektur kelembagaan DtZ saling berkaitan dalam dinamika advokasi transnasional.

2.1. Aliansi DtZ

Dalam upaya global untuk mengatasi masalah ESKA, DtZ hadir sebagai bentuk komitmen transnasional yang bertujuan untuk mengeliminasi fenomena CST. Bagian ini akan menguraikan berbagai aspek dari aliansi ini, mulai dari sejarah pendirian hingga program advokasi yang dijalankan.

2.1.1. Sejarah dan Latar Belakang Pendirian

DtZ adalah aliansi yang didirikan sebagai respon terhadap meningkatnya perhatian global terhadap eksploitasi seksual anak dalam industri pariwisata dan perjalanan. Aliansi ini memiliki sejarah panjang dalam upaya global untuk memerangi eksploitasi seksual anak. Pada tahun 1996, Kongres Dunia Pertama

Menentang ESKA diselenggarakan di Stockholm, Swedia, yang menandai adanya pengakuan internasional terhadap pentingnya masalah ini (Milatina & Hanura, 2018). Kongres ini menghasilkan Deklarasi dan Agenda Aksi yang menjadi landasan bagi berbagai inisiatif global untuk melawan eksploitasi seksual anak, termasuk eksploitasi dalam industri pariwisata (Alexander et al., 2000).

DtZ sendiri secara resmi dibentuk pada tahun 2016 sebagai program kolaboratif yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri Belanda. Pembentukan aliansi ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa penanganan masalah eksploitasi seksual anak memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas negara. Aliansi ini merupakan pengembangan dari berbagai inisiatif sebelumnya yang telah berupaya mengatasi eksploitasi seksual anak, namun dengan fokus yang lebih spesifik pada CST (Down to Zero, 2019).

Latar belakang pendirian DtZ juga dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas global dan kemudahan akses perjalanan internasional yang, secara tidak langsung, memfasilitasi peningkatan CST. Studi yang dilakukan oleh ECPAT International dan berbagai organisasi perlindungan anak menunjukkan korelasi antara pertumbuhan industri pariwisata global dan peningkatan risiko eksploitasi seksual anak. Di negara-negara seperti Thailand yang menjadi destinasi utama wisata internasional, risiko ini menjadi semakin nyata dan membutuhkan penanganan khusus (ECPAT International, 2020).

Pembentukan DtZ juga didorong oleh kesadaran akan keterbatasan pendekatan yang berfokus hanya pada satu negara atau satu aspek masalah. Eksploitasi seksual anak dalam konteks pariwisata melibatkan jaringan

transnasional yang kompleks, mulai dari pelaku yang berasal dari berbagai negara hingga praktik perdagangan anak lintas batas. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya berfokus pada penegakan hukum atau hanya pada perlindungan korban dianggap tidak memadai (Spurrier, 2020). Sehingga, diperlukan adanya strategi global yang komprehensif dan terkoordinasi secara internasional dan inilah yang menjadi landasan utama pembentukan DtZ.

Dalam tahap awal pembentukannya, DtZ merumuskan kerangka kerja yang berfokus pada intervensi di dua benua utama yang diidentifikasi memiliki prevalensi tinggi eksploitasi seksual anak dalam konteks pariwisata, yaitu Benua Asia (Bangladesh, Filipina, India, Indonesia, Thailand) dan Benua Amerika terutama Amerika Latin (Brazil, Bolivia, Kolombia, Nicaragua, Peru, Republik Dominika) (Down to Zero, 2019). Thailand dipilih sebagai salah satu fokus utama mengingat sejarah panjang negara ini sebagai destinasi *Sex Tourism* dan prevalensi tinggi eksploitasi seksual anak yang dilaporkan.

2.1.2. Struktur dan Keanggotaan

DtZ memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk memfasilitasi kerja sama efektif antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya penghapusan eksploitasi seksual anak. Struktur ini mencerminkan sifat aliansi yang transnasional terlihat dari anggota-anggotanya yang berasal dari berbagai negara dan sektor. Pusat dari struktur organisasi DtZ adalah lima organisasi inti yang disebut sebagai “*Core Alliance Members*”. Kelima organisasi ini adalah Defence for Children - ECPAT, Free a Girl, Plan International, Terre des Hommes Netherlands, dan ICCO Cooperation. Kelima organisasi ini membentuk *steering*

committee yang bertanggung jawab untuk menetapkan arah strategis aliansi, mengalokasikan sumber daya, dan mengevaluasi kemajuan program (Down to Zero, 2019).

Gambar 2.1 Keanggotaan DtZ



Sumber: Share-Net Netherlands, 2021

Masing-masing organisasi inti bekerja sama meskipun memiliki bidang keahlian dan fokus yang berbeda. Defence for Children - ECPAT memiliki keahlian dalam advokasi kebijakan dan kerangka hukum untuk perlindungan anak. Free a Girl fokus pada penyelamatan dan rehabilitasi korban eksploitasi seksual anak. Plan International memiliki keahlian dalam program pengembangan masyarakat berbasis anak. Terre des Hommes Netherlands memiliki pengalaman dalam melawan perdagangan anak dan pariwisata seks anak. Sementara ICCO Cooperation berkontribusi dengan menyediakan keahlian dalam pengembangan

ekonomi dan pengentasan kemiskinan, yang merupakan faktor penting dalam mencegah eksploitasi anak (Down to Zero, 2019).

Di luar lima organisasi inti ini, DtZ membentuk jaringan yang lebih luas yang mencakup organisasi lokal di negara-negara target, termasuk Thailand. Di Thailand, DtZ bermitra dengan berbagai organisasi lokal seperti, FACE, Childline Thailand Foundation, ThaiHotline, Alliance Anti-Traffic (AAT), dan ECPAT Thailand. Organisasi-organisasi mitra lokal ini berperan sebagai implementator utama program-program DtZ di lapangan, dengan dukungan teknis dan finansial dari organisasi-organisasi inti. Struktur DtZ juga mencakup kelompok kerja tematik yang berfokus pada berbagai aspek pemberantasan eksploitasi seksual anak. Kelompok-kelompok ini meliputi kelompok kerja pencegahan, kelompok kerja perlindungan dan dukungan korban, kelompok kerja advokasi kebijakan, dan kelompok kerja keterlibatan sektor swasta. Kelompok-kelompok kerja ini berfungsi sebagai forum untuk berbagi pengetahuan, mengembangkan strategi, dan mengkoordinasikan upaya antara berbagai anggota aliansi (Alpenidze et al., 2020).

Dalam konteks operasional, DtZ menerapkan pendekatan multi-level yang mencakup intervensi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Fokus di tingkat lokal adalah pada implementasi program langsung untuk melindungi anak-anak, mendukung korban, dan mencegah eksploitasi. Di tingkat nasional, DtZ bekerja untuk memperkuat kebijakan dan penegakan hukum. Sementara di tingkat internasional, DtZ terlibat dalam advokasi kebijakan global (Down to Zero, 2021). Keanggotaan DtZ juga diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku

kepentingan lain, termasuk lembaga pemerintah, organisasi internasional seperti UNICEF dan ILO, institusi akademik, dan sektor swasta. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan menyeluruh yang diadopsi oleh aliansi, mengakui bahwasanya penghapusan eksploitasi seksual anak memerlukan keterlibatan semua sektor masyarakat (Alpenidze et al., 2020).

2.1.3. Tujuan dan Misi

Misi utama DtZ adalah untuk mengeliminasi ESKA di negara-negara target, termasuk Thailand, melalui pendekatan yang bersifat kolaboratif dan multisektor. Misi ini mencerminkan komitmen aliansi untuk menciptakan dunia di mana semua anak dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual dan dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman. Tujuan jangka panjang DtZ adalah mencapai “nol toleransi” terhadap eksploitasi seksual anak, yang tercermin dalam nama aliansi itu sendiri “Down to Zero”. Visi ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak, tanpa pengecualian, memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi, sebagaimana diatur dalam UNCRC. DtZ melihat eksploitasi seksual anak bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai pelanggaran fundamental terhadap martabat dan hak dasar anak (Down to Zero, 2019).

Untuk mencapai visi ini, DtZ telah menetapkan serangkaian tujuan strategis yang lebih spesifik. Pertama, DtZ bertujuan untuk mencegah eksploitasi seksual anak melalui peningkatan kesadaran, pendidikan, dan pengembangan kapasitas masyarakat untuk melindungi anak-anak. Tujuan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pencegahan adalah cara paling efektif untuk menghentikan

eksploitasi, dan bahwa masyarakat yang teredukasi dan diberdayakan dapat menjadi garis pertahanan terdepan dalam melindungi anak-anak. Kedua, DtZ bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan anak di negara-negara target. Hal ini meliputi upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga perlindungan anak, memperkuat kerangka hukum dan kebijakan, dan memastikan bahwa mekanisme perlindungan yang ada berfungsi secara efektif untuk mencegah eksploitasi dan merespon secara tepat ketika eksploitasi terjadi. Ketiga, DtZ bertujuan untuk mendukung anak-anak yang telah menjadi korban eksploitasi seksual, memastikan bahwa mereka menerima bantuan yang dibutuhkan untuk pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Dukungan ini mencakup perawatan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk memungkinkan anak-anak membangun masa depan yang lebih baik. Keempat, DtZ berupaya untuk memastikan bahwa pelaku eksploitasi seksual anak diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. DtZ mendukung upaya untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kerja sama internasional dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Kelima, DtZ bekerja untuk melibatkan sektor swasta, khususnya industri pariwisata, dalam upaya mencegah eksploitasi seksual anak (Down to Zero, 2019).

Tujuan dan misi yang dimiliki oleh DtZ ini mengandung prinsip-prinsip dasar sebagai panduan di antaranya yaitu, pendekatan berbasis hak, partisipasi anak, inklusi, keberlanjutan, dan pembelajaran berkelanjutan. DtZ berkomitmen untuk melibatkan anak-anak sebagai agen perubahan aktif, bukan hanya sebagai penerima pasif dari intervensi. DtZ juga mengakui pentingnya mengatasi akar

penyebab eksploitasi seksual anak, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan diskriminasi (Down to Zero, 2019).

2.1.4. Program Advokasi

Program advokasi merupakan komponen penting dari strategi DtZ dalam mengeliminasi eksploitasi seksual anak. DtZ menerapkan pendekatan advokasi multilevel yang mencakup advokasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional, dengan tujuan untuk memengaruhi kebijakan, praktik, dan norma sosial yang berkaitan dengan perlindungan anak dari eksploitasi seksual (Alpenidze et al., 2020).

Di tingkat lokal, DtZ menjalankan program advokasi berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang eksploitasi seksual anak dan memobilisasi masyarakat untuk melindungi anak-anak. Program ini mencakup pembentukan mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat, seperti komite perlindungan anak desa dan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko. DtZ juga bekerja sama dengan pemimpin masyarakat, guru, petugas kesehatan, dan kelompok masyarakat lainnya untuk membangun kapasitas mereka dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan merespons kasus eksploitasi seksual anak (Down to Zero, 2022).

Di Thailand, program advokasi lokal DtZ telah berhasil membentuk jaringan perlindungan anak di beberapa daerah yang diidentifikasi sebagai *hotspot* untuk CST. Misalnya, di Pattaya, yang terkenal sebagai salah satu pusat *sex tourism* di Thailand, DtZ telah bekerja dengan organisasi mitra lokal untuk membentuk koalisi masyarakat yang berfokus pada perlindungan anak. Koalisi ini

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemimpin masyarakat, pemilik usaha lokal, dan perwakilan dari industri pariwisata, yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak (Alpenidze et al., 2020).

Di tingkat nasional, DtZ melakukan advokasi kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual. Advokasi ini meliputi upaya untuk mereformasi undang-undang terkait, memastikan implementasi yang efektif dari kebijakan perlindungan anak yang ada, dan mendorong alokasi sumber daya yang memadai untuk upaya perlindungan anak. Contohnya, DtZ telah aktif dalam mengadvokasi penguatan undang-undang *anti-trafficking* dan undang-undang perlindungan anak. Aliansi ini telah bekerja sama dengan organisasi mitra lokal untuk menganalisis kelemahan dalam kerangka hukum Thailand dan mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan. DtZ juga telah terlibat dalam dialog dengan pembuat kebijakan Thailand, termasuk anggota parlemen, pejabat kementerian, dan penegak hukum, untuk mendorong adopsi dan implementasi kebijakan yang lebih kuat terhadap eksploitasi seksual anak (Alpenidze et al., 2020).

DtZ juga melakukan advokasi untuk meningkatkan kapasitas sistem peradilan Thailand dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak. Ini termasuk pelatihan untuk polisi, jaksa, dan hakim tentang bagaimana menangani kasus yang melibatkan anak-anak korban dengan sensitif, dan bagaimana mengumpulkan dan menggunakan bukti dalam kasus eksploitasi seksual anak. DtZ juga mendukung

upaya untuk memperkuat mekanisme perlindungan saksi untuk anak-anak yang memberikan kesaksian dalam kasus eksploitasi seksual (Down to Zero, 2022).

Di tingkat internasional, DtZ terlibat dalam advokasi kebijakan global yang bertujuan untuk meningkatkan norma dan standar internasional terkait perlindungan anak dari eksploitasi seksual. DtZ aktif berpartisipasi dalam forum internasional seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ASEAN, Komite Hak Anak PBB, dan berbagai konferensi internasional yang membahas isu-isu terkait perlindungan anak (Down to Zero, 2020).

DtZ juga mengadvokasi keterlibatan sektor swasta, khususnya industri pariwisata, dalam upaya mencegah eksploitasi seksual anak. Aliansi ini telah bekerja dengan asosiasi industri pariwisata, perusahaan perjalanan, hotel, dan penyedia layanan pariwisata lainnya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan praktik yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi. Salah satu inisiatif tersebut adalah The Code (Kode Perilaku untuk Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dalam Perjalanan dan Pariwisata), yang merupakan inisiatif multi-stakeholder yang didukung oleh DtZ. The Code meminta perusahaan pariwisata untuk mengadopsi serangkaian kebijakan dan prosedur untuk mencegah eksploitasi seksual anak, termasuk di antaranya yaitu pelatihan staf dan memberi informasi kepada pelanggan terkait hak anak dan pencegahan eksploitasi seksual anak. Di Thailand, DtZ telah berhasil mengadvokasi agar sejumlah besar perusahaan pariwisata menandatangani dan mengimplementasikan The Code (Down to Zero, 2019).

DtZ juga menggunakan media dan komunikasi publik sebagai alat advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang isu eksploitasi seksual anak dan membangun dukungan publik. DtZ telah mengembangkan dan melaksanakan berbagai kampanye komunikasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang realitas eksploitasi seksual anak dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Kampanye-kampanye ini sering kali menargetkan wisatawan internasional yang berkunjung ke Thailand, dengan pesan bahwa eksploitasi seksual anak adalah kejahatan serius yang membawa konsekuensi hukum bagi pelaku. Misalnya, DtZ telah mendukung kampanye “*Don’t Look Away*” yang mendorong wisatawan untuk melaporkan kasus dugaan eksploitasi seksual anak yang mereka saksikan selama perjalanan mereka (ECPAT, 2022).

Secara keseluruhan, program advokasi DtZ mencerminkan pendekatan menyeluruh aliansi terhadap penghapusan eksploitasi seksual anak, dengan pandangan bahwa perubahan yang berkelanjutan memerlukan intervensi di berbagai tingkatan dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Melalui advokasi ini, DtZ berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak, dengan kasus eksploitasi seksual mencapai nol toleransi.

2.2. Konteks CST di Thailand

Untuk memahami upaya DtZ dalam mengeliminasi CST, penting untuk mengetahui konteks fenomena ini di Thailand. Bagian ini akan menganalisis Thailand sebagai destinasi wisata, dampak pariwisata terhadap munculnya CST, data statistik terkait, serta tantangan dan hambatan dalam penanganannya.

2.2.1. Gambaran Umum Thailand sebagai Destinasi Wisata

Thailand menempati posisi yang sangat strategis dalam peta pariwisata dunia. Negara ini tidak hanya menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara, tetapi juga telah mengembangkan berbagai bentuk pariwisata yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand, pada paruh pertama tahun 2024, lebih dari 17,5 juta wisatawan asing mengunjungi Thailand, yang menghasilkan pendapatan sekitar 825 miliar Baht atau setara dengan US\$22,5 miliar yang menyumbang sekitar 11% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. (*The Thai Government Public Relations Department*, 2024). Untuk mendorong industri ini lebih lanjut, Pemerintah Thailand, melalui Otoritas Pariwisata Thailand (TAT), telah melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan negara ini sebagai destinasi wisata. Salah satunya melalui kampanye pemasaran seperti “*Amazing Thailand*”. Pemerintah juga telah berinvestasi dalam infrastruktur pariwisata, termasuk pengembangan bandara internasional, transportasi umum, dan fasilitas akomodasi (Kaosa-ard et al., 1998),

Perkembangan pariwisata di Thailand dapat ditelusuri kembali ke tahun 1960-an dan 1970-an, ketika negara ini mulai mempromosikan diri sebagai destinasi wisata internasional. Pada masa itu, Thailand juga menjadi tempat rekreasi bagi personel militer Amerika Serikat yang bertugas di Vietnam selama Perang Vietnam. Periode ini sering dikaitkan dengan awal mula berkembangnya industri seks di Thailand, yang kemudian berkembang menjadi komponen signifikan dari “wisata gelap” di negara ini (Suntikul, 2013).

Keberagaman destinasi wisata di Thailand menjadi salah satu daya tarik utama. Kota metropolitan seperti Bangkok menawarkan perpaduan antara modernitas dan tradisi, dengan kuil-kuil megah, pasar malam yang ramai, serta kehidupan malam yang dinamis. Sementara itu, kawasan pesisir seperti Phuket, Krabi, dan Phang Nga dikenal dengan pantai-pantai berpasir putih, taman nasional bawah laut, serta keindahan alam lainnya. Phang Nga, misalnya, menjadi salah satu tujuan utama wisatawan dengan daya tarik seperti resor pantai Khao Lak, taman nasional Surin dan Similan, serta keindahan teluk Phang Nga yang ikonik dengan formasi batu kapur dan hutan bakau yang luas. Pada tahun 2022, Phang Nga mencatat kunjungan lebih dari satu juta wisatawan, dan pemerintah setempat menargetkan peningkatan hingga 10 juta wisatawan dalam beberapa tahun ke depan (The Nation, 2022).

Namun, di balik pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata, terdapat tantangan besar terkait pembangunan infrastruktur yang belum merata. Infrastruktur di Phang Nga, misalnya, masih tertinggal dibandingkan dengan Phuket, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pelayanan publik, pengelolaan limbah, dan sistem perlindungan sosial. Sehingga, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Ketergantungan pada sektor pariwisata dan pertanian menciptakan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, khususnya dalam konteks perlindungan anak dan kelompok rentan (ECPAT International, 2025).

Transformasi pariwisata di Thailand juga sangat dipengaruhi oleh tren global pasca-pandemi Covid-19. Munculnya berbagai bentuk wisata baru seperti

ekowisata, wisata komunitas, digital nomad, dan *voluntourism* menambah kompleksitas dinamika sosial di destinasi wisata. *Voluntourism*, di mana wisatawan terlibat dalam proyek sosial di komunitas lokal, semakin diminati, terutama oleh wisatawan muda dari negara-negara Barat. Namun, fenomena ini juga membawa risiko tersendiri, karena interaksi yang lebih dekat antara wisatawan dan anak-anak lokal dapat membuka celah terjadinya eksploitasi seksual, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki sistem perlindungan anak yang memadai. Selain itu hadirnya digitalisasi industri pariwisata tidak hanya mempercepat akses dan pertukaran informasi, tetapi juga memperluas peluang bagi pelaku kejahatan seksual anak untuk memanfaatkan platform daring dalam mencari korban dan mengatur pertemuan secara tersembunyi. Keberadaan penginapan informal seperti *homestay*, persewaan apartemen, dan *guest house* di sekitar lokasi wisata utama sering kali menjadi titik rawan terjadinya eksploitasi seksual anak, karena lemahnya pengawasan dan regulasi (ECPAT International, 2025).

Namun, terdapat juga perkembangan positif di industri pariwisata dimana kesadaran wisatawan global terhadap isu keberlanjutan dan perlindungan anak semakin meningkat. Survei Booking.com pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 76% wisatawan dunia menganggap penting untuk melakukan perjalanan secara berkelanjutan, termasuk memilih destinasi yang berkomitmen pada perlindungan hak anak (GSTC, 2023). Sehingga, Pemerintah Thailand dan para pelaku industri pariwisata kini dihadapkan pada tuntutan untuk membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi dalam seluruh aspek pengelolaan destinasi wisata, serta

mampu merespons dinamika dan tantangan baru yang muncul seiring perkembangan industri pariwisata. Upaya menjadikan pariwisata Thailand lebih aman bagi anak-anak tidak hanya menjadi kebutuhan moral, tetapi juga menjadi nilai tambah dalam persaingan destinasi wisata global.

Lebih jauh lagi, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlindungan anak menjadi elemen yang tak terpisahkan. Seperti yang ditegaskan dalam laporan ECPAT International (2025), “*Making tourism safe for children is an intrinsic and necessary element of holistic sustainability.*” Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Thailand tidak dapat dilepaskan dari upaya sistematis untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak di seluruh destinasi wisata. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran wisatawan global akan pentingnya memilih destinasi yang mengedepankan prinsip-prinsip hak anak dan keberlanjutan sosial. Sehingga, dapat dilihat bahwa gambaran umum Thailand sebagai destinasi wisata tidak hanya mencerminkan keberhasilan ekonomi dan daya tarik budaya, tetapi juga menunjukkan tantangan dan peluang besar dalam membangun sistem perlindungan anak yang kuat dan berkelanjutan.

2.2.2. Dampak Pariwisata terhadap Fenomena CST

Industri pariwisata Thailand yang berkembang pesat telah membawa dampak ekonomi positif yang signifikan, namun juga telah menciptakan kondisi yang memfasilitasi berkembangnya CST. Hubungan antara pariwisata *mainstream* dan CST di Thailand bersifat kompleks dan mencakup berbagai aspek, termasuk

aspek ekonomi, sosial, dan struktural. Salah satu dampak signifikan dari perkembangan pariwisata di Thailand adalah munculnya ekonomi paralel yang berbasis pada eksploitasi seksual, termasuk eksploitasi terhadap anak-anak. Meskipun mayoritas wisatawan datang ke Thailand untuk tujuan legal, terdapat segmen wisatawan yang secara khusus tertarik pada *sex tourism*, termasuk mereka yang mencari hubungan seksual dengan anak-anak. Selain itu, beberapa wisatawan yang awalnya tidak bermaksud terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak-anak mungkin melakukannya karena tersedianya kesempatan atau persepsi bahwa praktik tersebut diterima secara sosial dan tidak akan dihukum (Hawke & Raphael, 2016).

Industri pariwisata juga telah meningkatkan permintaan terhadap berbagai layanan yang secara tidak langsung menciptakan lingkungan tempat eksploitasi seksual anak dapat terjadi. Hotel, bar, klub malam, dan tempat-tempat hiburan lainnya yang melayani wisatawan seringkali menjadi tempat di mana anak-anak dieksploitasi secara seksual (Chia, 2016). Meskipun tidak semua perusahaan pariwisata terlibat dalam atau mendukung CST, beberapa secara aktif memfasilitasi praktik ini, sementara yang lain mungkin secara tidak sengaja menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya eksploitasi. Dari sisi ekonomi, pariwisata telah menciptakan kesenjangan pendapatan yang signifikan di Thailand, dengan beberapa daerah dan kelompok masyarakat mendapatkan keuntungan yang signifikan dari industri ini, sementara yang lain tetap terbelakang. Ketidaksetaraan ekonomi ini, dikombinasikan dengan kurangnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang layak, terutama di daerah pedesaan

dan di kalangan kelompok minoritas etnis, telah mendorong migrasi internal ke pusat-pusat pariwisata. Hal ini meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual anak (Montgomery, 2008).

Kemiskinan merupakan faktor pendorong utama di balik CST di Thailand. Banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem mungkin melihat “penjualan” anak mereka ke industri seks sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup secara ekonomi (Liebolt, 2014). Dalam beberapa kasus, orang tua mungkin tidak sepenuhnya memahami kondisi yang akan dihadapi anak mereka, atau mereka mungkin ditipu oleh perekrut yang menjanjikan pekerjaan yang sah di kota-kota besar. Dalam kasus lain, keputusan untuk terlibat dalam perdagangan anak untuk tujuan seksual mungkin didorong oleh keputusan ekonomi, tekanan hutang, atau kombinasi dari faktor-faktor sosial dan ekonomi lainnya (Srisang, 1990).

Selain faktor ekonomi, norma gender dan praktik budaya tertentu di Thailand juga berkontribusi terhadap kerentanan anak-anak terhadap eksploitasi seksual. Di sebagian masyarakat Thailand, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan kelompok etnis tertentu, terdapat ekspektasi bahwa anak perempuan akan berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga mereka. Perpaduan antara harapan ini dengan kesempatan ekonomi yang terbatas dapat membuat anak perempuan sangat rentan terhadap eksploitasi, termasuk melalui CST (Statham, 2020). Selain itu, dalam beberapa komunitas Thailand, terutama yang terpengaruh oleh industri pariwisata, pekerjaan seks telah menjadi cara yang diterima untuk menghasilkan pendapatan, dengan stigma yang relatif rendah

dibandingkan dengan masyarakat lain. Normalisasi pekerjaan seks ini dapat menyebabkan kesediaan yang lebih besar untuk menerima atau bahkan mendorong keterlibatan anak-anak dalam industri seks (Simpkins, 1997).

Industri pariwisata Thailand juga telah menciptakan permintaan untuk “pengalaman otentik” dan interaksi dengan penduduk lokal, yang dalam beberapa kasus dapat menjadi pintu masuk untuk eksploitasi. Misalnya, kunjungan ke desa-desa suku atau magang di organisasi yang bekerja dengan anak-anak dapat memberikan akses kepada individu yang berniat jahat untuk target potensial. Tanpa pengawasan dan perlindungan yang memadai, interaksi ini dapat menyebabkan eksploitasi (ECPAT International, 2020). Digitalisasi dan perkembangan teknologi juga berpengaruh dalam menyuburkan aksesibilitas CST di Thailand. Internet dan media sosial memungkinkan pelaku potensial untuk terhubung dengan korban potensial, serta dengan perantara yang dapat memfasilitasi eksploitasi. Platform daring juga memungkinkan pelaku untuk berbagi informasi tentang di mana dan bagaimana mengakses anak-anak untuk tujuan seksual, serta untuk berbagi konten berupa eksploitasi anak. Perkembangan ini telah membuat CST menjadi lebih tersembunyi dan lebih sulit untuk dideteksi dan ditangani oleh pihak berwenang (ECPAT International, 2025).

Adanya pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang mendalam terhadap industri pariwisata Thailand dan dinamika CST di negara ini. Di satu sisi, penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan telah secara signifikan mengurangi jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Thailand, sehingga secara potensial mengurangi permintaan untuk CST. Di sisi lain, krisis ekonomi

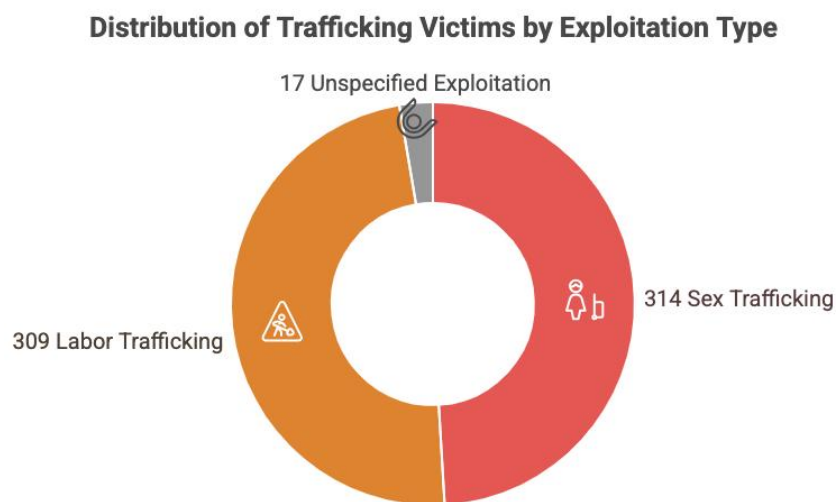
yang ditimbulkan oleh pandemi telah memperburuk kemiskinan dan ketidakamanan ekonomi, yang dapat meningkatkan kerentanan anak-anak terhadap eksploitasi. Selain itu, pandemi telah mempercepat transisi menuju bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang difasilitasi secara digital, termasuk eksploitasi seksual anak daring dan *streaming* langsung pelecehan seksual anak (ECPAT International, 2025).

2.2.3. Data dan Statistik CST di Thailand

Mengumpulkan data yang akurat tentang fenomena CST di Thailand merupakan tantangan tersendiri karena sifat ilegal dan tersembunyi dari fenomena ini. Meskipun demikian, berbagai penelitian, laporan dari organisasi non-pemerintah, dan data pemerintah memberikan gambaran tentang skala dan karakteristik CST di Thailand. Pada tahun 2005, peneliti, pemerintah, dan NGO memperkirakan bahwa terdapat 30.000 hingga 40.000 anak yang terlibat dalam prostitusi di bawah usia 18 tahun di Thailand. Pusat Perlindungan Hak Anak di Thailand juga menyatakan bahwa sekitar 40% dari mereka yang terlibat dalam prostitusi di Thailand berusia di bawah 18 tahun. Data terbaru dari Royal Thai Government's Country Report (2023) menunjukkan bahwa total kasus *human trafficking* yang tercatat adalah 640 kasus, dengan kasus prostitusi anak mencapai 198 kasus. Total 640 korban perdagangan manusia tersebut mencakup 489 warga negara Thailand, tujuh warga negara Laos, 39 warga negara Burma, empat warga negara India, 33 korban dari Indonesia, 25 korban dari negara lain (Burundi, Kamboja, Ethiopia, Ghana, Kenya, Tiongkok, Rwanda, Afrika Selatan, Tajikistan, Tanzania, Uganda, dan Uzbekistan), serta 43 korban dari negara yang tidak

ditentukan; dan terdiri dari 314 korban perdagangan seksual, 309 korban perdagangan tenaga kerja, dan 17 korban dari bentuk eksploitasi yang tidak ditentukan (Royal Thai Government, 2023).

Gambar 2.2 Distribusi Korban Trafficking dari Jenis Eksploitasi



Sumber: Royal Thai Government Report, 2023

Laporan *Disrupting Harm* untuk Thailand yang dirilis pada tahun 2022 mengungkapkan adanya peningkatan kasus eksploitasi seksual anak yang terkait langsung dengan aktivitas pariwisata, baik yang dilakukan oleh wisatawan domestik maupun asing. Salah satu temuan penting dari laporan tersebut adalah bahwa lebih dari 30% kasus eksploitasi seksual anak yang dilaporkan di Thailand terjadi di kawasan wisata utama seperti Bangkok, Pattaya, Phuket, dan Chiang Mai. Data ini mengindikasikan bahwa destinasi wisata utama dengan arus wisatawan tinggi cenderung menjadi titik rawan terjadinya CST (Disrupting Harm, 2022).

Di Provinsi Phang Nga, yang menjadi salah satu fokus studi kasus ECPAT International, tercatat adanya peningkatan laporan kasus eksploitasi seksual anak sejak tahun 2022, sejalan dengan meningkatnya jumlah wisatawan pasca-pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, seorang pejabat kepolisian di Phang Nga bahkan ditangkap karena terlibat dalam jaringan eksploitasi seksual anak, menandakan adanya keterlibatan oknum aparat dalam praktik ilegal ini (ECPAT International, 2025). Kasus ini menjadi sorotan nasional dan memperkuat argumentasi bahwa CST tidak hanya melibatkan pelaku luar, tetapi juga jaringan lokal yang terorganisir dan terkadang mendapat perlindungan dari aparat tertentu.

Selain data insiden, statistik dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat lebih dari 1.200 kasus eksploitasi seksual anak yang ditangani oleh lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, dengan sebagian besar korban berusia antara 12 hingga 17 tahun (US State Department, 2024). Namun, angka ini diyakini masih jauh di bawah angka sebenarnya, mengingat banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat rasa takut, stigma, dan kurangnya akses korban terhadap layanan perlindungan. Studi ECPAT International memperkirakan bahwa angka gelap (*dark number*) kasus eksploitasi seksual anak di sektor pariwisata bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari jumlah kasus yang tercatat secara resmi (ECPAT, 2021).

Karakteristik korban CST di Thailand juga sangat beragam. Studi yang dilakukan oleh ECPAT International (2025) mengungkapkan bahwa anak-anak dari kelompok rentan, seperti anak migran dari Myanmar dan Kamboja, anak jalanan,

serta anak yang bekerja di sektor informal, memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban eksploitasi seksual di sektor pariwisata. Mayoritas korban yang dilaporkan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, dengan kasus melibatkan pelaku yang merupakan wisatawan asing atau pekerja di industri pariwisata. Anak-anak migran, khususnya yang tidak memiliki dokumen resmi, sangat rentan karena mereka sulit mengakses layanan perlindungan, pendidikan, dan bantuan hukum (ECPAT, 2025).

Selain itu, laporan ECPAT International juga menyoroti adanya pola-pola eksploitasi yang semakin canggih, termasuk penggunaan teknologi digital untuk mencari dan merekrut korban, serta jaringan kriminal yang terorganisir lintas negara. Pelaku CST tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri, termasuk wisatawan domestik, pekerja migran, dan bahkan oknum aparat penegak hukum. Studi-studi tersebut juga menunjukkan bahwa mayoritas korban CST di Thailand adalah perempuan, meskipun eksploitasi terhadap anak laki-laki juga terjadi dan mungkin kurang dilaporkan. Usia korban bervariasi, tetapi banyak studi menunjukkan bahwa semakin muda anak, semakin tinggi “*value*” mereka dalam industri seks. Beberapa laporan menunjukkan bahwa anak-anak seusia 10 tahun atau bahkan lebih muda dieksploitasi secara seksual di beberapa daerah di Thailand (Hawke & Raphael, 2016).

Studi lain oleh IPEC (*International Programme on the Elimination of Child Labour*) menemukan bahwa eksploitasi seksual anak di Thailand terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks. Termasuk di antaranya prostitusi berbasis jalan di mana anak-anak ditawarkan langsung kepada wisatawan di tempat-tempat

seperti pantai, bar, dan klub malam. Lalu, terdapat pula prostitusi berbasis tempat di mana anak-anak “dipekerjakan” di tempat-tempat seperti rumah bordil, salon pijat, dan bar karaoke, dan eksploitasi seksual yang difasilitasi oleh internet di mana pelaku menggunakan platform daring untuk memesan layanan seksual yang melibatkan anak-anak (De Vries, 2018).

Laporan Tahunan Perdagangan Orang yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS juga memberikan wawasan tentang situasi di Thailand. Dalam laporan tahun 2024, Thailand ditempatkan di Tier 2 Watch List, yang menunjukkan bahwa pemerintah Thailand tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia, meskipun sedang melakukan upaya yang signifikan untuk melakukannya. Laporan tersebut mencatat bahwa anak-anak tetap rentan terhadap perdagangan seks di Thailand, terutama anak-anak dari kelompok minoritas etnis, komunitas migran, dan keluarga miskin (US State Department, 2024).

Studi yang dilakukan oleh ECPAT menemukan bahwa pelaku CST di Thailand berasal dari berbagai negara, dengan pelaku dari negara-negara Asia Timur (seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan), Asia Tenggara, Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Profil pelaku sangat bervariasi, termasuk wisatawan jangka pendek yang secara khusus melakukan perjalanan ke Thailand untuk tujuan seks dengan anak-anak (pelaku preferensial), ekspatriat yang tinggal di Thailand, dan wisatawan situasional yang mungkin tidak secara khusus mencari hubungan seksual dengan anak-anak tetapi memanfaatkan kesempatan ketika tersedia (Hawke & Raphael, 2016.)

Dampak COVID-19 pada CST di Thailand telah menjadi fokus penelitian terbaru. Meskipun pembatasan perjalanan telah mengurangi jumlah wisatawan asing yang dapat melakukan perjalanan ke Thailand, beberapa penelitian menunjukkan peningkatan dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak yang difasilitasi oleh teknologi. Misalnya, laporan dari Internet Watch Foundation mencatat peningkatan 77% dalam laporan tentang materi pelecehan seksual anak yang dihasilkan sendiri selama periode *lockdown* pada tahun 2020, yang mencerminkan bagaimana pelaku telah beradaptasi dengan situasi baru dengan mengeksploitasi anak-anak secara jarak jauh (IWF, 2020).